

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*“Pelaut Eropa terperangah melihat puncak gunung bersalju di khatulistiwa. Saat mulai menjelajah, mereka menemukan emas terhampar didasar sungai. Inilah awal Papua ditemukan dan menemukan masalah berkepanjangan”*. Riswandha Imawan<sup>1</sup>.

Dari awal tambang emas di tanah Papua memang sudah menjadi incaran pihak asing, penemuan lokasi tambang di Papua pun juga ditemukan oleh peneliti asing. Bangsa Indonesia pun seakan tak bisa berbuat banyak dalam pengelolaan hasil tambang. Perusahaan tambang asing yang memiliki modal dan teknologi tinggilah yang kemudian mengeksplorasi dan mengelola kekayaan tambang di Indonesia. Jika diamati sebagian besar kekayaan alam Indonesia dibidang pertambangan telah dikuasai oleh tiga perusahaan raksasa pertambangan Amerika, seperti Exxon, Newmont, dan Freeport. Tiga raksasa pertambangan Amerika inilah yang memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam Indonesia, beberapa diantaranya yaitu blok Cepu oleh Exxon, tambang emas Minahasa oleh Newmont, dan tambang emas di Timika Papua dikuasai oleh Freeport. Pegunungan Erstberg dan Grassberg di Papua yang menjadi lokasi penambangan emas PT Freeport sebenarnya merupakan tambang emas terbesar yang dimiliki bangsa Indonesia, bahkan menjadi sumber emas terbesar didunia.

Awal ditemukannya “Erstberg” atau gunung bijih, berawal dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti geologi asal Belanda Jean Jacques Dozy pada tahun 1936. Hasil penelitian Dozy sempat tersimpan lama dipergustakaan Universitas

---

<sup>1</sup> Riswandha Imawan. Dibawah Gunung Kemakmuran. [www.jawapos.co.id](http://www.jawapos.co.id) diakses tanggal 1 November 2006.

Leiden hingga ditemukan oleh Forbes Wilson, seorang Geolog *Freeport Sulphur Company* yang berpusat di Louisiana, Amerika Serikat pada tahun 1939.<sup>2</sup> Forbes Wilson dan Del Flint kemudian pada Juni 1960 membuktikan penelitian Dozy dengan mendatangi tanah Papua di Indonesia dan mereka pun menemukan Erstberg dengan potensi cadangan bijih emas dan tembaga yang besar di pegunungan Erstberg.

PT Freeport Indonesia kemudian merencanakan proyek pertambangan di Papua. Sebenarnya PT Freeport Indonesia adalah anak perusahaan Freeport McMoRan Cooper&Gold, produsen emas dan tembaga terbesar di dunia asal Amerika Serikat yang dipimpin oleh James Robert Moffett. Kepemilikan saham PT Freeport Indonesia mayoritas dikuasai oleh Freeport McMoRan sebesar 81,28 persen, PT Indocopper Investama Corp selaku operator tambang menguasai 9,4 persen, dan pemerintah Indonesia sebesar 9,4 persen.<sup>3</sup> Dengan kondisi seperti inilah pemerintah Indonesia memiliki posisi tawar yang sangat lemah, tidak banyak keuntungan yang bisa dinikmati oleh pemerintah maupun rakyat Papua dari hasil bumi mereka sendiri.

Tanggal 7 April 1967 PT Freeport membangun kerjasama dengan pemerintah Indonesia dengan penandatanganan kontrak karya pertama antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan pemerintah. Kontrak karya tersebut memberikan kebebasan bagi PT Freeport melakukan aktivitas penambangan selama 30 tahun. Dan dalam perkembangannya operasi tambang yang dilakukan PT Freeport Indonesia semakin meningkat dan semakin memperluas lahan

---

<sup>2</sup> www.ptfi.com 10 Mei 2006

<sup>3</sup> Tempo, Maret-April 2006. hal 31.

eksplorasinya. Pada tahun 1975 ditemukan lokasi baru berupa cadangan deposit tembaga disebelah timur gunung Erstberg oleh PT Freeport Indonesia.<sup>4</sup> Dan pada tahun 1976 dibangun lokasi pertambangan disekitar lokasi tersebut. Penemuan sumber emas tersebut tidak hanya berhenti sampai disitu, pada tahun 1988 tambang emas Grassberg juga ditemukan. Seiring dngan penemuan lokasi tambang baru tersebut kontrak karya pertama yang belum selesai masanya tersebut kemudian diperpanjang hak pengelolaannya pada kotrak karya kedua, yaitu pada tahun 1991 dan diperpanjang 30 tahun hingga tahun 2021 dan masih ditambah opsi perpanjangan dua kali 10 tahun.

Kekayaan tambang di Papua ternyata diluar dugaan, cadangan emas yang terkandung mencapai 3046 ton emas, serta 31 juta ton tembaga, dan 10 ribu ton perak.<sup>5</sup> Cadangan emas tersebut merupakan jumlah terbesar di dunia dan merupakan cadangan tembaga terbesar kedua didunia. Dengan cadangan tambang yang begitu besar, pada tahun 2004 PT Freeport memiliki total pendapatan sebesar 2,3 miliar dolar. Dari total pendapatan tersebut pemerintah Indonesia hanya mendapat 308 juta dolar ditahun 2004.

Hasil bumi yang melimpah ruah ternyata hanya dinikmati oleh PT Freeport Indonesia dan pemerintah pusat, masyarakat Timika yang sebenarnya memiliki hak atas kandungan bumi yang ada diatas tanah mereka, hanya memperoleh 200 juta dolar dalam rentang waktu sembilan tahun sejak tahun 1996 hingga 2005. Padahal jumlah tersebut hanya satu persen dari laba kotor PT Freeport Indonesia

---

<sup>4</sup> [www.fajaronline.com](http://www.fajaronline.com) diakses tgl 10 Mei 2006

<sup>5</sup> [www.walhi.or.id](http://www.walhi.or.id) diakses tgl 01 Oktober 2006

untuk tiap tahunnya.<sup>6</sup> Dengan realitas yang ada, masyarakat dikabupaten Timika saat ini hanya bisa menjadi penonton ditanah kelahiran mereka sendiri.

Dalam perkembangannya PT Freeport Indonesia semakin memperluas dan memperlebar lokasi operasi pertambangannya, jika pada 1970 lokasi yang digarap PT Freeport hanya seluas 10 km persegi, kemudian dengan ditemukannya sumber tambang baru luas operasi PT Freeport Indonesia melebar hingga 120 km persegi. Hingga saat ini tanah yang dikuasai oleh PT Freeport Indonesia adalah sebesar 25.000 km persegi.<sup>7</sup> Dengan adanya perluasan areal pertambangan maka secara otomatis mengakibatkan terjadinya perubahan ekosistem lingkungan yang sangat drastis dari kawasan hutan menjadi kawasan industri.

Dari sisi tenaga kerja yang dipekerjakan di PT Freeport Indonesia, masyarakat Papua secara keseluruhan juga tersisihkan dalam memperoleh kesempatan bekerja. Jika diamati pada tahun 2004, jumlah karyawan PT Freeport Indonesia sebanyak 18.700 orang. Dari jumlah tersebut 97,2 persen adalah WNI (Warga Negara Indonesia), yaitu 18.199 orang dan 2,8 persen adalah WNA (Warga Negara Asing). Dari 97,2 persen WNI tersebut hanya 26 persen diantaranya adalah masyarakat Papua.<sup>8</sup> Dengan jumlah tersebut tak heran jika angka pengangguran dari tahun ketahun semakin tinggi di Papua. Kondisi inilah yang mungkin memunculkan kecemburuan sosial dan kesenjangan ekonomi di Papua.

Selain munculnya masalah pengangguran, keberadaan PT Freeport Indonesia pun juga berdampak pada sektor lingkungan, kesehatan, pendidikan,

---

<sup>6</sup> Jawa Pos, 27 Februari 2006

<sup>7</sup> www.fajaronline.com 10 Mei 2006

<sup>8</sup> Pikiran Rakyat, 28 Februari 2006

dan ekonomi. Dari sisi lingkungan, berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun lembaga pemerintah dibidang lingkungan hidup bersuara sama dan menyatakan bahwa aktivitas produksi PT Freeport Indonesia dinyatakan telah mencemari lingkungan. Dari temuan Tim Program Penilai Kinerja Perusahaan yang berada dibawah kementrian lingkungan hidup, ditemukan beberapa pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Pertama, pengelolaan air asam tambang dari sisi barat Grassberg yang tidak memenuhi ketentuan bakumutu air limbah untuk pertambangan emas dan tembaga. Kedua, air buangan yang keluar dari penampungan limbah tambang disungai Ajkwa melalui titik Pandan Lima ditemukan padatan tersuspensi 812 miligram perliter, padahal standar pemerintah adalah 200 miligram per liter.<sup>9</sup> Selain itu pembuangan *Tailing* (limbah) didua tempat tersebut juga tak memiliki ijin.

Kemudian dibidang kesehatan, kondisinya pun masih jauh dari harapan. Menurut Conservation International Indonesia 2004, angka kematian bayi di Papua cukup tinggi yaitu sebesar 100 per seribu kelahiran bayi hidup.<sup>10</sup> Angka tersebut belum berubah meski telah ditetapkan pemberlakuan otonomi khusus di Papua. Selain itu angka kematian ibu melahirkan juga tinggi, yaitu 60-700 per seratus ribu kelahiran.

Bidang pendidikan, kondisinya juga tak jauh memprihatinkan. Dari jumlah penduduk asli Papua sekitar 1,5 juta jiwa, jumlah penduduk yang tamat SD sebesar 21,64 persen, tamat SMU sebesar 10,6 persen, dan tamat perguruan tinggi

---

<sup>9</sup> Tempo, *Ibid.* hal 40

<sup>10</sup> Kompas, 11 Maret 2006

hanya 1,91 persen. Sehingga kondisi ini menyebabkan pertumbuhan infrastruktur yang ada di Papua berjalan lambat.

Dibidang ekonomi, masyarakat Papua masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan. Meski daerah mereka memiliki cadangan emas terbesar didunia, angka kemiskinan semakin lama semakin meningkat. Jika melihat data dari Badan Pusat Statistik 2004, jumlah masyarakat miskin mencapai 38,7 persen dari total penduduk Papua. Selain itu penelitian yang dilakukan Universitas Cendrawasih pada tahun 2001 juga menunjukkan 74 persen penduduk Papua hidup didaerah terisolasi dan tidak memiliki sarana dan prasarana transportasi kepusat-pusat pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial, dan ekonomi. Sehingga masih ada masyarakat Papua yang hidup secara *food gathering complex* (mencari makan dengan berburu dan mengumpulkan makanan).<sup>11</sup>

Dengan kondisi tersebut tak ada pilihan lain bagi masyarakat Papua untuk menggantungkan hidupnya dengan melakukan penambangan emas disekitar saluran pembuangan *tailing* (limbah) PT Freeport, meski kegiatan masyarakat tersebut tergolong ilegal. Aktivitas penambangan liar tersebut memang menggiurkan bagi sebagian besar masyarakat Papua khususnya masyarakat disekitar kabupaten Timika, emas yang mereka dapatkan dari hasil penambangan liar mereka jual dipasar dengan harga seratus dua puluh ribu rupiah untuk setiap satu gram emas. Satu gram emas bisa mereka dapatkan selama satu hari, dan mereka melakukan aktivitas penambangan rata-rata sekitar enam hari lamanya. Tidak mudah bagi masyarakat Timika jika ingin melakukan aktivitas

---

<sup>11</sup> Tempo, *Ibid.* hal 53.

penambangan disalurkan pembuangan *tailing* PT Freeport, para penambang illegal tersebut harus membayar kepada "oknum" petugas keamanan PT Freeport yaitu sebesar tujuh ratus ribu rupiah untuk sekali masuk keareal pembuangan *tailing* dan mereka bisa melakukan penambangan rata-rata selama tujuh hari.

Karena aktivitas penambangan yang bersifat illegal kadang terjadi benturan antara masyarakat penambang dengan pihak PT Freeport, pada kesekian kalinya pada tanggal 21 Februari 2006 terjadi bentrokan antara pihak keamanan PT Freeport dengan para penambang illegal. Peristiwa tersebut menyebabkan dua personel keamanan PT Freeport terluka akibat lemparan batu dan tiga orang penambang mengalami luka-luka tertembak senapan pihak keamanan PT Freeport.<sup>12</sup> Tak diduga akibat dari peristiwa bentrokan tersebut semakin lama masalah semakin berkembang kearah aksi pemblokiran pintu masuk di Mile 72-74 hingga demo yang menuntut PT Freeport ditutup. Aksi demo yang menuntut pertanggung jawaban PTFI semakin lama semakin berkembang luas, di beberapa daerah aksi demo dilakukan secara besar-besaran seperti di Jakarta, Manado, Jayapura, dan Semarang. Dikota-kota lain pun juga terjadi aksi demo menentang keberadaan PT Freeport, meski dengan jumlah yang tidak begitu besar.

Aksi yang dilakukan masyarakat dalam menentang keberadaan PT Freeport baik di Timika maupun dikota lain di Indonesia ketika itu telah menjadi perhatian khusus bangsa Indonesia. Salah satunya jika dilihat dari pemberitaan-pemberitaan dimedia massa baik cetak maupun elektronik. Media cetak secara kontinyu memberitakan perkembangan keadaan masyarakat Papua yang semakin

---

<sup>12</sup> Jawa Pos, 23 Februari 2006.

lama semakin berkembang pada tuntutan penutupan PT Freeport Indonesia dan tuntutan itu lebih banyak disuarakan oleh masyarakat Papua yang melakukan aksi diluar Propinsi Papua.

Kasus perseteruan masyarakat Papua dengan PT Freeport kali ini memiliki potensi konflik yang lebih besar, karena dalam perkembangannya banyak pihak seperti beberapa elite politik juga ikut memberikan tekanan terhadap keberadaan PT Freeport di Indonesia yang pada kenyataannya tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Sedangkan pemerintah Indonesia berada pada posisi dilematis, disatu sisi pemerintah akan melanggar kontrak karya jika mengikuti kehendak masyarakat Papua dan tidak mendapatkan bagian dari hasil produksi PT Freeport, disisi yang lain pemerintah harus bekerja keras mensejahterakan masyarakat Papua dengan kekayaannya mulai dari awal jika PT Freeport ditutup. Sehingga dengan kondisi seperti ini posisi media dalam bersikap dan menginterpretasikan realitas akan sangat mempengaruhi pemahaman pembaca terhadap realitas yang sebenarnya.

Menurut hasil Pre-survei yang telah dilakukan oleh penulis, dari beberapa media cetak nasional yang mengangkat kasus konflik di Timika Papua. Ada dua media cetak yang intens<sup>13</sup> memberikan perhatian pada kasus ini, yaitu harian Kompas dan harian Republika, kedua media yang memiliki latar belakang

---

<sup>13</sup> Intensitas tersebut dilihat dari banyaknya pemberitaan yang muncul dikedua media yaitu, Kompas dan Republika. Judul berita pada harian **Kompas** antara lain: Jangan salahkan penduduk lokal dalam bentrokan di Freeport (23/02); Warga terus demo PT FI (28/02); Unjuk rasa anti-freeport meluas (01/03); Meneg LH: Kerusakan akibat Freeport parah (02/01); Pemerintah, freeport dan suku-suku di Papua harus dialog (03/03); dll. Sedangkan harian **Republika** antara lain: Selesaikan Tanpa Korban (24/02); Freeport Diminta Segera Beroperasi (25/02); Diblokade Massa, Freeport Hentikan Operasi Sementara (27/02); Kontrak Freeport tak akan Dibatalkan (01/03); Tinjau Ulang Kontrak Freeport Harus Total (02/03); Warga Timika Demo MRP dan DPRP (15/03); dll.

ideologi yang berbeda menurut penulis sangat menarik untuk diteliti lebih jauh mengenai bagaimana media tersebut menggambarkan kasus perseteruan dua kelompok menurut kacamata ideologi masing-masing media. Penulis melihat kedua media cetak tersebut memiliki pandangan atau sikap yang berbeda dalam memaknai kasus Freeport. Pada harian Republika realitas yang dibentuk dalam memaknai kasus PT Freeport, yaitu Republika lebih menghendaki PT Freeport tetap beroperasi dan menuntaskan penyelesaian konflik melalui jalan damai dengan tanpa kekerasan, kontrak karya yang telah dibuat oleh pemerintah tetap dijalankan sesuai kesepakatan dengan tanpa mengesampingkan tuntutan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Papua. Sedangkan harian Kompas lebih menginginkan PT Freeport berhenti beroperasi, karena keberadaan PT Freeport justru tidak membuat masyarakat Papua sejahtera dengan kekayaan alam yang mereka miliki.

Kedua sikap media tersebut memiliki perbedaan yang sangat menarik untuk diteliti lebih dalam. Perbedaan latar belakang dan ideologi yang dimiliki kedua media akan berpengaruh terhadap konstruksi realitas yang akan dibentuk. Kejadian yang sama dapat dimaknai berbeda oleh masing-masing media. Sehingga obyektivitas sebuah berita tergantung bagaimana sebuah media memaknai realitas yang berkembang. Sisi-sisi mana yang ditonjolkan oleh media dan sisi-sisi mana yang dilupakan oleh media. Analisis framing adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media.<sup>14</sup> Sehingga analisis framing akan coba melihat bagaimana kasus perseteruan

---

<sup>14</sup> Eriyanto, *Analisis Framing; Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, Yogyakarta.LKIS.2002, hal 66.

masyarakat Papua dengan PT Freeport tersebut dibingkai oleh harian Kompas dan harian Republika.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana harian Kompas dan harian Republika mengkonstruksi kasus perseteruan antara masyarakat Timika dengan PT Freeport Indonesia. Setelah terjadinya bentrokan antara masyarakat yang menambang secara ilegal dengan pihak keamanan PT Freeport pada tanggal 21 Februari 2006.

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan melihat rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konstruksi pemberitaan yang digunakan oleh harian Kompas dan harian Republika dalam kasus perseteruan masyarakat Timika dengan PT Freeport Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana sikap media dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemberitaan media dalam kasus perseteruan masyarakat Timika Papua dengan PT Freeport Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu komunikasi yaitu dalam kajian analisis isi media serta dapat memberikan kontribusi khususnya pada kajian metode analisis framing, sehingga referensi konsep-konsep dalam analisis framing akan semakin berkembang. Dan diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam mengkaji kasus konflik PT Freeport dengan Masyarakat Papua khususnya dikabupaten Mimika.

### **b. Manfaat Praktis**

Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat sebagai konsumen media bisa mengetahui proses produksi berita di media, bagaimana realitas yang sebenarnya dibentuk oleh media dalam pemberitaannya. Sehingga masyarakat secara kritis dapat menyeleksi pemberitaan-pemberitaan yang disampaikan oleh media sehingga khalayak tidak menerima begitu saja berita yang disajikan media.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Paradigma Konstruksionis**

Memilih paradigma adalah hal yang wajib dilakukan oleh peneliti agar penelitiannya dapat menempuh alur berfikir yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Melalui paradigma seorang peneliti akan memiliki *world view* yang memandunya selama melakukan proses penelitian.

Paradigma merupakan pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang

ilmu pengetahuan. Paradigma membantu merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang mesti dijawab, bagaimana harus menjawabnya, serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam rangka menjawab persoalan-persoalan tersebut.

Paradigma konstruksionis pada awalnya dicetuskan oleh kaum konstruksionis. Pendekatan ini tumbuh berkat dorongan dari kaum interaksi simbolik dan juga karya-karya Schutz, Berger dan Luckman. Istilah konstruksionis itu sendiri memiliki peristilahan yang berbeda-beda meskipun demikian istilah-istilah tersebut menunjuk pada pengertian yang sama.

Paradigma dalam Ilmu Komunikasi menurut pandangan John Fiske dalam buku *Introduction to Communications Studies (1990)*, dan telah ditulis ulang dengan judul *Cultural and Communication Studies: Sebuah Pengantar Paling Komperhensif (2005)*. Menjelaskan dua paradigma yang mendasar dalam Ilmu Komunikasi yaitu paradigma positivisme dan konstruktivisme. Menurut Fiske paradigma positivisme adalah pandangan yang melihat komunikasi sebagai proses transmisi pesan dan paradigma konstruktivisme adalah pandangan yang melihat komunikasi sebagai proses produksi dan pertukaran makna. Berikut pandangan John Fiske dalam bukunya "*Introduction to Communication Studies*":

*"the structure of this book reflect the fact thah there are two main school in the study of communication. The first sees communication as the transmition of message. It concerned with how senders and recievers encode and decode... the second school sees comunication as the production and exchange of meaning. It is concerned with how message, or texts, interact with people in order to produce meanings. That is, it is concerned with the role of texts in our culture"*<sup>15</sup>

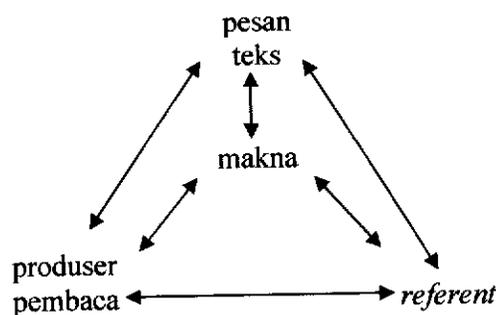
---

<sup>15</sup> Fiske (1990) *Introduction to Communication Studies, Second Editon*, London and New York, Routledge, hal. 2-4

“Struktur buku ini mencerminkan sebuah fakta-fakta bahwa ada dua paradigma besar dalam Ilmu Komunikasi. Pertama komunikasi dipandang sebagai proses transmisi atau pengiriman pesan. Hal ini ditekankan pada bagaimana pengirim pesan mengirimkan pesan, dan penerima pesan menerima pesan... yang kedua, Ilmu Komunikasi dipandang sebagai produksi dan pertukaran makna. Hal ini ditekankan pada bagaimana pesan-pesan atau teks-teks berinteraksi dengan khalayak agar dapat menghasilkan makna, maka dari itu titik perhatiannya adalah bagaimana aturan teks dalam kebudayaan kita”

Pandangan pertama yang biasa disebut Fiske sebagai mazhab “proses” cenderung lebih menggunakan ilmu-ilmu sosial khususnya psikologi dan sosiologi dan lebih menitikberatkan pada tindakan komunikasi.

Gambar 2. Pesan dan makna



*“The message, then, is not something sent from A to B, but an element in a structured relationship whose other elements include external reality and the producer/ reader. Producing and reading the text are seen as parallel, processes in that occupy the same place in this structured relationship. We might model this structure as a triangle in which arrows represent constant interaction; the structure is not static but a dynamic practice”.*<sup>16</sup>

”Pesan, dengan demikian bukanlah sesuatu yang dikirim dari A ke B, tetapi sebagai bagian dalam struktur hubungan diantara lain realitas luar dan pembuat/pembaca. Membuat dan membaca teks tidak semata secara parallel, jika tidak serupa, proses itu menempati tempat yang sama dalam struktur hubungan. Kita dapat lihat model hubungan ini sebagai segitiga-

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 4.

dimana anak panah menunjukkan interaksi yang konstan hubungan ini tidak statis tapi sebuah praktek yang dinamis.”

Sering kali orang melawankan paradigma konstruksionis dengan paradigma positivis. Dengan istilah yang berbeda, para ahli membuat dikotomi antara dua paradigma ini. Namun demikian, pada dasarnya mereka ingin menunjukkan perbedaan antar keduanya. Maka, agar lebih jelas melihatnya, dibawah ini penulis merangkum perbedaan diantara keduanya dalam tabel I dibawah ini.

**Tabel I**  
**Perbedaan Paradigma Positivis dan Konstruksinis**

Positivis	Konstruksionis
1. Ada fakta riil yang diatur oleh kaidah-kaidah tertentu yang berlaku universal.	1. Fakta merupakan konstruksi atas realitas. Kebenaran suatu fakta bersifat relatif, berlaku dalam konteks tertentu.
2. Media sebagai saluran pesan.	2. Media sebagai agen konstruksi pesan.
3. Berita adalah cermin dan refleksi dari kenyataan. Karena itu, berita haruslah sama dan sebangun dengan fakta yang hendak diliput.	3. Berita tidak mungkin merupakan cermin dan refleksi dari realitas. Karena berita yang terbentuk merupakan konstruksi atas realitas.
4. Berita bersifat obyektif: Menyingkirkan opini dan pandangan subyektif dari pembuat berita.	4. Berita bersifat subyektif: Opini tidak dapat dihilangkan karena ketika meliput, wartawan melihat dengan perspektif dan pertimbangan subyektif.

5. Wartawan sebagai pelapor.	5. Wartawan sebagai partisipan yang menjembatani keanekaragaman subyektifitas pelaku sosial.
6. Nilai, etika, opini dan pilihan moral berada diluar proses peliputan berita.	6. Nilai, etika, atau keberpihakan wartawan dapat dipisahkan dari proses peliputan dan pelaporan suatu berita.
7. Nilai, etika, dan pilihan moral harus berada diluar proses penelitian.	7. Nilai, etika, dan pilihan moral bagian tak terpisahkan dari suatu penelitian.
8. Berita diterima sama dengan apa yang dimaksudkan oleh pembuat berita.	8. Khalayak mempunyai penafsiran sendiri yang bisa jadi berbeda dari pembuat berita.
9. Tujuan penelitain: eksplanasi, prediksi, dan Kontrol.	9. Tujuan penelitian: Rekonstruksi realitas sosial secara dialektis antara peneliti dengan pelaku sosial yang dileliti.
10. Peneliti berperan sebagai <i>disinterested scientist</i> .	10. Peneliti berperan sebagai <i>passionate participant</i> , fasilitator yang menjembatani keragaman subyektifitas pelaku sosial.
11. Transmisi: makna terdapat secara inheren ada dalam teks, dan ditransmisikan kepada pembaca.	11. Negosiasi: Makna adalah hasil dari proses saling mempengaruhi antara teks dan pembaca. Makna bukan ditransmisikan, tetapi dinegosiasikan.
12. Dualis: Ada realitas objektif, sebagai suatu realitas yang eksternal di luar peneliti. Peneliti harus sejauh mungkin membuat jarak dengan objek	12. Transaksionalis: Pemahaman tentang suatu realitas, atau temuan suatu penelitian merupakan produk interaksi antara peneliti dengan yang

penelitian.	diteliti.
13. Objektif: Analisis teks tidak boleh menyertakan penafsiran atau opini peneliti.	13. Subjektif Penafsiran bagian tidak terpisahkan dari penelitian teks. Bahkan dasar dari analisis teks.
14. Intevensionis: Pengujian hipotesis dalam struktur hipotetico- deductive method : melalui lab eksperimen atau survei eksplanatif, dengan analisis kuantitatif.	14. Reflekif/dialektik: menekankan empati dan interaksi dialektis antara peneliti- teks untuk merekonstruksi realitas yang diteliti melalui metode kualitatif.
15. Kriteria kualitas penelitian: Objektif, validitas, dan reliabilitas (internal dan eksternal).	15. Kriteria kualitas penelitian: Otentisitas dan reflektivitas; sejauh mana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas dihayati oleh para pelaku sosial.

Tabel I: Eriyanto, *Analisis Framing; Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, Yogyakarta. LKIS. 2002.

## 2. Konstruksi Realitas Sosial

Konsep konstruksi sosial atas realitas menjadi terkenal ketika diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif Peter L. Berger. Tesis utama Berger adalah manusia dan masyarakat merupakan produk yang dialektis, dinamis, dan plural secara terus-menerus.<sup>17</sup> Berger mengatakan bahwa masyarakat tidak lain adalah produk manusia, namun secara terus menerus mempunyai aksi kembali terhadap penghasilnya. Sebaliknya manusia adalah hasil atau produk dari masyarakat.

Menurut Berger dan Luckmann realitas sosial dikonstruksi melalui proses dengan tiga tahapan, yaitu proses eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi.

<sup>17</sup> Eriyanto, *Ibid.* hal 13.

*Eksternalisasi* (penyesuaian diri), pada tahap ini setiap individu atau pelaku sosial akan memaknai setiap realitas secara berbeda. Pandangan subyektif terhadap sebuah realitas bisa berbeda-beda karena masing-masing individu dipengaruhi oleh kemampuan kognitif, lingkungan, dan pengalaman yang berbeda-beda. Sedangkan *Obyektivasi*, yaitu proses interaksi dan sosialisasi makna subyektif setiap individu terhadap makna subyektif. Hasil dari proses eksternalisasi individu tersebut menghasilkan realitas subyektif. Proses ini merupakan bentuk konkrit dari internalisasi disertai catatan bahwa hasil obyektivasi tersebut berlaku secara umum. Sedangkan *Internalisasi*, adalah proses dimana individu mengidentifikasi dirinya dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya.

Menurut Berger realitas itu sebenarnya tidak dibentuk secara ilmiah, maupun sesuatu yang diturunkan begitu saja. Tetapi sebaliknya realitas dibentuk dan dikonstruksi. Dengan keberadaan tersebut realitas dapat dikatakan berwajah ganda atau plural. Setiap orang mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas, maka wajar jika seseorang akan menafsirkan realitas sesuai kerangka berpikir (*frame of reference*) dan kerangka pengalamannya (*frame of experience*) masing-masing. Menurut John Fiske perbedaan sosial pun dapat mempengaruhi pemaknaan meski dalam teks yang sama, "*So readers with different social experience or from different cultures may find different meanings in the same text*"<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Fiske, John, (1990). *Introduction to Communication Studies, Second Editon*, London and New York, Routledge, hal. 30.

Menurut James W. Carey bahwa realitas bukanlah sesuatu yang terberi, seakan-akan ada, realitas sebaliknya diproduksi:

*“Reality is not Given, not humanity existent, independent of language and toward which language stands as a pale refraction. Rather, reality is brought into existence,, is produced, by communication,—by in short, the construction apprehension, and utilization of symbolic forms. Reality, while not a mere function of a symbolic forms, is produced by a terministic system—that focus its existence in specific terms”.*<sup>19</sup>

Eriyanto melihat realitas yang tersaji dalam media menurut pendekatan konstruksionis adalah suatu realitas subyektif yang terbentuk lewat pemahaman dan pemaknaan subyektif dari wartawan. Wartawan dilapangan memiliki keleluasaan dalam membentuk dan memproduksi realitas. Sehingga kenyataan yang sebenar-benarnya akan tersaji menurut subyektifitas wartawan yang melakukan peliputan berita dilapangan.

Dalam konteks media, pandangan diatas juga terjadi dalam rutinitas media. Setiap individu dalam media, terutama wartawan memiliki *mind set* berfikir sendiri yang disebut dengan realitas subyektif. Ketika mereka masuk dalam institusi media tempat mereka bekerja, mau tidak mau mereka harus mengelaborasi realitas subyektif individunya dengan realitas subyektif individu lain dalam satu organisasi. Masing-masing media memiliki karakteristik sendiri dalam mencitrakan sebuah fakta melalui realitas simbolik yang dibuatnya. Dan proses dialektika (eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi) tersebut dialami secara berbeda oleh masing-masing media.

---

<sup>19</sup> Eriyanto, *Ibid.* hal 20.

### 3. Media Dan Proses Produksi Berita

Sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai media dan proses produksi berita penulis mencoba untuk menjelaskan definisi dari media itu sendiri. Menurut Alex Sobur, media (pers) sering disebut banyak orang sebagai *the fourth estate* (kekuatan keempat) dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini terutama disebabkan oleh suatu persepsi tentang peran yang dapat dimainkan oleh media dalam kaitannya dengan pengembangan kehidupan sosial-ekonomi dan politik masyarakat. Bahkan, media, terlebih dalam posisinya sebagai suatu institusi informasi, dapat pula dipandang sebagai faktor yang paling menentukan dalam proses-proses perubahan sosial-budaya dan politik. Oleh karena itu, dalam konteks media massa sebagai institusi informasi, Karl Deutsch, menyebutnya sebagai “urat nadi pemerintah” (*the nerves of government*).<sup>20</sup>

Alex Sobur sendiri mendefinisikan media massa sebagai:

“Suatu alat untuk menyampaikan berita, penilaian, atau gambaran umum tentang banyak hal, ia mempunyai kemampuan untuk berperan sebagai institusi yang dapat membentuk opini publik, antara lain, karena media juga dapat berkembang menjadi kelompok penekan atas suatu ide atau gagasan, dan bahkan suatu kepentingan atau citra yang ia representasikan untuk diletakkan dalam konteks kehidupan yang lebih empiris.”<sup>21</sup>

Ungkapan senada juga dilontarkan Dedy N Hidayat, dimana, media massa berfungsi memasok dan menyebarluaskan informasi yang diperlukan dalam penentuan sikap, dan memfasilitasi pembentukan opini publik dengan menempatkan dirinya sebagai wadah independen dimana isu-isu permasalahan

---

<sup>20</sup> Dedy N Hidayat dalam kata pengantar, Agus Sudibyo, politik Media dan Pertarungan Wacana, LKIS, Yogyakarta, 2001, hal 37.

<sup>21</sup> Sudibyo, Agus. Politik Media dan Pertarungan Wacana, LKIS, Yogyakarta, 2001, hal 37.

umum bisa diperdebatkan.<sup>22</sup> Namun kadang secara sadar maupun tidak informasi yang didapatkan seseorang dari sebuah media massa tertentu memiliki kecenderungan subyektif yang besar, tentunya arah dan tingkat subyektifitas pemberitaan (informasi) tersebut tergantung oleh kepentingan dan ideologi media massa tersebut.

Untuk saat ini media mempunyai posisi strategis, jika diamati konsumsi masyarakat terhadap media semakin tinggi. Ini terjadi seiring dengan berkembangnya kebebasan pers sehingga masyarakat memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi khususnya informasi yang benar. Sejalan dengan berkembangnya industri pers di Indonesia, media juga dituntut untuk memiliki tanggung jawab kepada khalayak. Menurut Lasswel dan Wright (1954) media memiliki empat fungsi sosial, diantaranya: Pengamatan sosial (*social surveillance*); korelasi sosial (*social corelation*); sosialisasi (*socialization*); dan hiburan (*entertainment*).<sup>23</sup> Fungsi pengamatan sosial merujuk pada proses penyebaran informasi dan interpretasi yang obyektif mengenai peristiwa yang terjadi dalam lingkungan sosial. Sedangkan untuk saat ini fungsi sosial yang paling menonjol dimedia adalah fungsi hiburan.

Sedangkan menurut pandangan McQuaill (1994) ada enam perspektif dalam melihat peranan media<sup>24</sup>:

---

<sup>22</sup> Sudibyo, Agus. Ibid, hal 27.

<sup>23</sup> Harold D Lasswell dan Charless Wright (1954) dalam Sasa Djuarsa Sendjaja, "Akuntabilitas Media Massa Dalam Menghadapi Benturan Kepentingan". Jurnal Ilmu Komunikasi Januari-April 2004. hal 7-8.

<sup>24</sup> Subiakto, Henry "Menggagas Sistem Media Yang Demokratis Untuk Indonesia Baru", dalam Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi, Ibid. hal.10-11.

- a. Media dipandang sebagai *Window an events and experience*, disitu media dipandang sebagai jendela yang memungkinkan khalayak untuk mengetahui berbagai peristiwa serta apa yang terjadi diluar. Atau dengan kata lain media dianggap sebagai sarana belajar untuk mengetahui berbagai peristiwa di dunia.
- b. Kemudian media diasumsikan sebagai *Mirror of events in society and the world, implaying faithful reflection*. Media merupakan cerminan dari berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia yang merefleksikan peristiwa dengan apa adanya. Media juga merupakan alat refleksi realitas.
- c. Media berperan sebgaai filter atau *gatekeeper* yang menyeleksi berbagai hal, mana yang perlu diberitakan dan mana yang tidak dianggap perlu, semua bergantung pada pihak media.
- d. Media mempunyai peran sebagai *guide*, penunjuk jalan atau sebagai *interpreter* yang menerjemahkan dan menunjukkan arah dari ketidakpastian, atau alternatif yang beragam.
- e. Media sebagai forum, mempresentasikan berbagai informasi dan ide-ide kepada khalayak, sehingga memungkinkan terjadinya *feedback*.
- f. *Interlocutor*, media tidak sekedar sebagai tempat untuk lalu-lalang informasi. Akan tetapi media juga sebagai partner komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi interaktif.

Konsep obyektivitas dalam pemberitaan media mencakup dua komponen pokok, faktualitas dan impartialitas.<sup>25</sup> Komponen faktualitas mengandung dua

---

<sup>25</sup> Westersthal dalam Sasa Djuarsa Sendjaja. *Ibid.* hal 10.

dimensi, yaitu kebenaran dan relevansi. Dimensi kebenaran adalah suatu berita yang menjelaskan suatu peristiwa bisa dikatakan faktual jika isi berita tersebut benar sesuai dengan realitas yang sesungguhnya. Sedangkan dimensi relevansi dalam implikasinya relatif lebih sulit dicapai secara obyektif karena berkaitan dengan interpretasi tentang keterkaitan antara peristiwa yang diberitakan dengan aktualitas dan kepentingan persoalan yang dihadapi masyarakat. Dan komponen impartialitas pun juga dibagi menjadi dua dimensi: keseimbangan dan netralitas. Ini berarti seorang wartawan harus dituntut untuk bersikap netral, dalam arti menghindarkan diri dari penilaian subyektif pribadinya, dan seimbang dalam menyajikan berita.

Dalam kenyataannya saat ini keseimbangan dan netralitas penyampaian berita pun sering kali mengalami benturan dengan kepentingan media sebagai sebuah industri. Kebebasan mengolah dan menulis berita dari para wartawan akan terikat oleh aturan-aturan yang ditempatkan oleh pimpinan dan pemilik media. Sehingga kinerja wartawan dilapangan sering mengalami benturan-benturan kepentingan antara para wartawan dan pemilik media.

Menurut Warren Breed, ketidakberdayaan para wartawan untuk melakukan perlawanan atas tekanan dari pemilik media umumnya disebabkan oleh enam fakta<sup>26</sup>, yaitu: Kuatnya pengaruh otoritas institusional dan sanksi atau imbalan; kuatnya budaya tunduk dan patuh pada atasan; kuatnya ambisi untuk berkembang dan memajukan karir; ketidakhadiran kelompok kritis atau oposisi

---

<sup>26</sup> Warren Breed (1995) dalam Sasa Djuarsa Sendjaja. *Ibid.* hal 11

dalam diri media; suasana kerja yang nyaman; kuatnya etos menjadikan berita sebagai sebuah nilai.

Dari berjuta-juta peristiwa didunia setiap hari, tidak semuanya peristiwa bisa dikatakan sebagai sebuah berita. Ada beberapa faktor yang menentukan kenapa peristiwa tertentu dianggap sebuah berita tetapi peristiwa yang lain tidak. Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese mengidentifikasi ada lima faktor yang mempengaruhi kebijakan redaksi untuk pengambilan keputusan dalam ruang pemberitaan<sup>27</sup>, yaitu:

a. Level Individual

Level individu ini mencakup latar belakang personal maupun profesional para wartawan atau jurnalis, antara lain seperti latar belakang suku, agama, pendidikan, jenis kelamin, etnisitas, pendidikan informal maupun formal, dan sikap individu terhadap peristiwa yang akan dilaporkan. Dalam level ini posisi wartawan memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai ujung tombak penentuan isi berita. Sebagai makhluk sosial seorang wartawan juga mempunyai sikap, nilai kepercayaan dan orientasi tertentu terhadap politik, agama, ideologi dan aliran dimana semua komponen itu berpengaruh terhadap hasil kerjanya (*media content*), sehingga kerap kali media tersebut terlibat dalam sebuah hegemoni (politik, budaya, atau ideologi).<sup>28</sup>

b. Level Rutinitas Media (*media rutine*)

---

<sup>27</sup> Sudibyo, Agus. "Politik Media dan Pertarungan Wacana". LKIS. Yogyakarta. 2001, hal 7-10.

<sup>28</sup> Sudibyo, Agus, dkk. *Kabar-Kabar Kebencian: Prasangka Agama di Media Massa*. ISAI. Jakarta. 2001, hal 68.

Aktivitas memproduksi berita dalam media adalah sebuah rutinitas, setiap hari institusi media secara teratur memproduksi berita dan proses penyeleksian berita atau proses *gatekeeper* pun juga merupakan bagian dari rutinitas. Dalam standar rutinitas media cetak, proses penyeleksian isu yang akan ditampilkan lebih ketat dan berlapis. Mulai dari proses perencanaan yang mencakup materi apa saja yang akan diliput, kemudian tahap peliputan yang dilakukan oleh wartawan dilapangan, dan masuk kedalam desk untuk proses *editing*, pada tahap akhir proses *gatekeeper* berperan penuh dalam pengolahan berita pada level redaktur. Proses *gatekeeper* akan mempertimbangkan untung rugi, layak tidak layak, aman tidak aman, bahkan sampai pertarungan kepentingan pribadi dalam dapur redaksi.<sup>29</sup>

### c. Level Organisasi

Level organisasi berhubungan dengan stuktur organisasi yang secara hipotetik mempengaruhi pemberitaan, kebijakan organisasi media juga memiliki peranan yang sangat strategis dalam proses penyaringan berita (*gatekeeper*). Kebijakan media akan mengarahkan media pada tujuan tertentu sesuai dengan tujuan media tersebut berdiri. Sehingga konsep berita apa yang akan ditampilkan, atau kriteria kelayakan berita juga ditentukan oleh sebuah kebijakan dalam organisasi media.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Syahputra Iswandi. *Jurnalisme Damai, Merentas Ideologi Peliputan di Area Konflik*. P Idea, Yogyakarta. 2006, hal 72.

<sup>30</sup> Sudibyo, Agus. "*Politik Media dan Pertarungan Wacana*". LKIS. Yogyakarta. 2001, hal 7.

#### d. Level Ekstra Media.

Faktor dari luar lingkungan media ternyata memiliki peranan dalam proses produksi berita, faktor tersebut diantaranya: Pertama, *State*. Besarnya intervensi pemerintah terhadap institusi media sangat ditentukan oleh corak dari masing-masing lingkungan eksternal media. Pemerintahan yang bersifat otoriter akan lebih mudah mendominasi media dalam menentukan berita yang layak disajikan kepada publik. Pemerintahan otoriter membuat atauran-aturan yang ketat yang memberikan batasan-batasan kepada industri media, sehingga pemberitaan yang disampaikan kepada publik nantinya adalah berita-berita yang sarat akan kepentingan penguasa. Pada masa Orde Baru, setiap institusi media harus mengantongi SIUPP, sehingga seakan-akan pemerintahlah yang memegang lisensi penerbitan dari semua media.<sup>31</sup>

Untuk faktor ketiga, Masing-masing bagian tersebut tidak selalu sejalan. Mereka mempunyai tujuan dan target masing-masing, sekaligus strategi yang berbeda untuk mewujudkan target tersebut. Bagian redaksi misalnya menginginkan agar berita tertentu disajikan, tetapi bagian sirkulasi menginginkan agar berita lain yang ditonjolkan karena terbukti dapat menaikkan penjualan. Setiap organisasi berita, selain mempunyai banyak elemen juga mempunyai tujuan dan filosofi organisasi sendiri. Berbagai elemen tersebut mempengaruhi bagaimana seharusnya wartawan bersikap, dan bagaimana juga seharusnya peristiwa disajikan dalam berita.

---

<sup>31</sup> Ibnu Hamad, "Konstruksi Realitas Politik dalam Media massa" Sebuah Studi *Critical Discourse Analysis* Terhadap Berita-berita Politik, Jakarta, Granit 2004, hal 132.

Sedangkan untuk faktor terakhir yaitu faktor ekstramedia yang jika kita lihat sebagai sebuah sistem maka faktor ini juga mempunyai beberapa sub sistem. Beberapa sub sistem yang termasuk dalam lingkungan di luar media (ekstramedia) antara lain:<sup>32</sup>

1. Sumber berita. Disini dipandang bukanlah sebagai pihak yang netral yang memberikan informasi apa adanya, ia juga mempunyai kepentingan untuk mempengaruhi media dengan berbagai alasan: memenangkan opini publik atau memberi citra tertentu kepada khalayak, dan seterusnya. Sebagai pihak yang mempunyai kepentingan, sumber berita tentu saja memberlakukan politik pemberitaan. Ia akan memberikan informasi yang baik bagi dirinya, dan mengembargo informasi yang tidak baik bagi dirinya. Kepentingan sumber berita ini seringkali tidak disadari oleh media. Pengelola media tidak sadar lewat teknik yang canggih, sebetulnya orientasi pemberitaan telah diarahkan untuk menguntungkan sumber berita. Media tidak sadar, telah menjadi corong dari sumber berita untuk menyampaikan apa yang dirasakan oleh sumber berita tersebut.
2. Sumber penghasilan media. Sumber penghasilan media ini bisa berupa iklan, bisa juga berupa pelanggan atau pembeli media. Media harus *survive*, dan untuk bertahan hidup kadangkala media harus berkompromi dengan sumber daya yang menghidupi mereka. Misalnya media tertentu tidak memberitakan kasus tertentu yang berhubungan dengan pengiklan. Pihak pengiklan juga mempunyai strategi untuk memaksakan versinya pada media. Ia tentu saja ingin kepentingannya dipenuhi, itu dilakukan diantaranya dengan cara memaksa media untuk mengembargo berita yang buruk mengenai mereka. Pelanggan dalam banyak hal juga ikut mewarnai pemberitaan media. Tema tertentu yang menarik dan terbukti mendongkrak penjualan, akan terus-menerus diliput oleh media. Media tidak akan menya-nyiakan momentum peristiwa yang disenangi oleh khalayak.
3. Pihak eksternal seperti pemerintah dan lingkungan bisnis. Pengaruh ini sangat ditentukan oleh corak dari masing-masing lingkungan eksternal media. Dalam negara yang otoriter misalnya pengaruh pemerintah menjadi faktor yang dominan dalam menentukan berita apa yang disajikan. Ini karena dalam negara yang otoriter, negara menentukan apa yang tidak boleh dan apa yang boleh diberitakan. Pemerintah dalam banyak hal memegang lisensi penerbitan, kalau media ingin tetap dan bisa terbit ia harus mengikuti batas-batas yang telah ditentukan oleh pemerintah terutama berita buruk akan diembargo atau dibatalkan, daripada nasib media

---

<sup>32</sup> Agus Sudibyo, Ibid, hal 10-12

bersangkutan akan mati. Keadaan ini tentu saja berbeda di negara yang demokratis dan menganut liberalisme. Campur tangan negara praktis tidak ada, justru pengaruh yang besar terletak pada lingkungan pasar dan bisnis.

4. Level ideologi. Ideologi disini diartikan sebagai kerangka berpikir atau kerangka referensi tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas dan bagaimana mereka menghadapinya. Berbeda dengan elemen sebelumnya yang tampak konkret, level ideologi ini abstrak. Ia berhubungan dengan persepsi atau posisi seseorang dalam menafsirkan realitas. Pada level ideologi akan dilihat lebih kepada yang berkuasa di masyarakat dan bagaimana media menentukan.

Pada prakteknya media massa akhirnya menjadi sebuah tolok ukur masyarakat dalam melihat sebuah isu yang terjadi, karena lambat laun keberadaan media massa inilah yang banyak mempengaruhi opini publik terhadap sebuah realitas yang terjadi. Oleh karena itulah apa yang disajikan media massa baik itu menyangkut sudut pandang dalam melihat realitas yang terjadi, sikap media massa terhadap sebuah realitas maupun dianggap penting atau tidaknya sebuah realitas melalui pemberitaannya terhadap sebuah realitas yang terjadi di masyarakat akan banyak mempengaruhi opini publik dalam menyikapi sebuah realitas yang terjadi. Dan opini publik terhadap sebuah realitas ini akan selalu beragam karena sudut pandangan media massa terhadap sebuah realitas juga beragam beragam menurut ideologi wartawan maupun media massa, dan kepentingan-kepentingan yang ada dalam tubuh media massa itu sendiri.

#### **4. Pengertian Berita**

Pendefinisian berita menurut kamus besar bahasa Indonesia (Balai Pustaka) adalah sebuah laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang sedang

hangat. Sehingga tujuan sebuah berita adalah untuk menginformasikan (*to inform*) sebuah peristiwa. Berita merupakan hasil akhir dari proses kompleks dengan menyortir (memilah-milah) dan menentukan peristiwa dan tema-tema tertentu dalam satu kategori tertentu.

Sedangkan pandangan Mark Fishman tentang berita, yaitu<sup>33</sup>:

*“News is neither reflection or distortion of reality because either of these characterization implies that news can record what is out there. News story, if they reflect anything, reflect the practice of the worker in the organizations that produce news. Some time ago Walter Gieber (1964) made the point that news is what newspapermen make it...”*

“Berita bukanlah merupakan sebuah refleksi atau distorsi sebuah realitas, karena karakter berita ini secara tidak langsung menyatakan bahwa berita dapat merekam kejadian diluar. Proses pembuatan berita, jika proses tersebut mencerminkan sesuatu, pada hakekatnya adalah mencerminkan praktek para pekerja disebuah organisasi yang memproduksi berita (media). Dahulu Walter Gieber (1964) menitikberatkan bahwasanya berita adalah apa yang dibuat seorang pembuat berita”

Menurut Fishman, ada dua kecenderungan studi bagaimana proses produksi berita dilihat pandangan pertama sering disebut sebagai pandangan seleksi berita (*selectivity of news*). Dalam bentuknya yang umum pandangan ini seringkali melahirkan teori seperti *gatekeeper*. Intinya, proses produksi berita adalah proses seleksi. Seleksi ini dari wartawan di lapangan yang akan memilih mana yang penting dan mana yang tidak, mana peristiwa peristiwa yang bisa diberitakan mana yang tidak. Setelah berita itu masuk ke tangan redaktur, akan diseleksi lagi dan disunting dengan menekankan bagian mana yang perlu dikurangi dan bagian mana yang perlu ditambah. Pandangan ini mengandaikan seolah-olah ada realitas yang benar-benar riil yang ada di luar diri wartawan.

---

<sup>33</sup> Eriyanto, *Ibid*, hal 100

Realitas yang riil itulah yang akan diseleksi oleh wartawan untuk kemudian dibentuk dalam sebuah berita. Pendekatan yang kedua adalah pembentukan berita (*creation of news*). Dalam perspektif ini, peristiwa itu bukan diseleksi, melainkan sebaliknya, dibentuk. Wartawanlah yang membentuk peristiwa: mana yang disebut berita dan mana yang tidak. Peristiwa dan realitas bukanlah diseleksi melainkan dikreasi oleh wartawan. Dalam perspektif ini, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana wartawan membuat berita. Titik perhatian terutama difokuskan dalam rutinitas dan nilai-nilai kerja wartawan yang memproduksi berita tertentu. Ketika bekerja wartawan bukanlah perekam yang pasif yang mencatat apa yang terjadi dan apa yang dikatakan seseorang. Melainkan sebaliknya, ia aktif. Wartawan berinteraksi dengan dunia (realitas) dan dengan orang yang diwawancarai, dan sedikit banyak menentukan bagaimana bentuk dan isi berita yang dihasilkan. Berita dihasilkan dari pengetahuan dan pikiran, bukan karena ada realitas objektif yang berada di luar, melainkan karena orang akan mengorganisasikan dunia yang abstrak ini menjadi dunia yang koheren dan beraturan serta mempunyai makna.<sup>34</sup>

Sedangkan Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese dalam bukunya "*Mediating The Message*" dengan kritisnya mengungkapkan bahwa "*.. and we establish that media that do not always mirror reality*"<sup>35</sup> (dan kami membuktikan bahwa media tidak selalu mencerminkan realitas). Berita yang ditulis tidaklah

---

<sup>34</sup> Mark Fishman, *Manufacturing News* dalam Eriyanto, *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, LKIS, Yogyakarta, 2002, hal 100-101

<sup>35</sup> Shoemaker and Reese (1996) *Mediating The Message, 2nd Edition*, New York, Longman Publishers USA, hal. 7

mencerminkan realitas yang sesungguhnya melainkan melalui berbagai proses di ruang redaksi.

Setelah berita disortir dan dipilah-pilah berita kemudian digolongkan menurut jenisnya. Pengkategorian berita digunakan untuk membedakan jenis isi berita dan subyek peristiwa yang menjadi berita. Menurut Tuchman ada lima kategori berita yang dipakai oleh wartawan.<sup>36</sup>

**Tabel II**  
**Kategori Berita**

<i>Hard News</i>	Berita mengenai peristiwa yang terjadi saat itu. Kategori berita ini sangat dibatasi oleh waktu dan aktualitas. Semakin cepat diberitakan semakin baik. Bahkan ukuran keberhasilan dari kategori berita ini adalah dari sudut kecepatannya diberitakan. Kategori berita ini dipakai untuk melihat apakah informasi itu diberikan kepada khalayak dan sejauh mana informasi tersebut cepat diterima oleh khalayak. Peristiwa yang masuk dalam kategori <i>hard news</i> ini bisa peristiwa yang direncanakan bisa juga berita yang tidak direncanakan.
<i>Soft News</i>	Kategori berita ini berhubungan dengan kisah manusiawi ( <i>human interest</i> ). Kalau dalam <i>hard news</i> , peristiwa yang diberitakan adalah peristiwa yang terjadi saat itu dan dibatasi oleh waktu, maka <i>soft news</i> tidak. Ia bisa diberitakan kapan saja. Karena yang menjadi ukuran adalah apakah informasi yang disajikan kepada khalayak tersebut menyentuh emosi dan perasaan khalayak. Perbedaan antara berita <i>hard news</i> dan <i>soft news</i> , adalah <i>hard news</i> merupakan cerita yang

<sup>36</sup> Gaye Tuchman, "Making News by Doing Work: Routinizing the Unexpected", dalam Morris Janowitz and Paul Hirsxh (ed.), *Reader and Public Opinion and Mass Communication Third Edition*, (New York: Macmillan Publishing, 1981). Hal 170-184 seperti yang dikutip oleh Erianto, *Ibid*, hal 109.

	menarik untuk manusia, sedangkan <i>soft news</i> adalah cerita yang menarik karena berhubungan dengan kehidupan manusia. <i>Hard news</i> berhubungan dengan peristiwa yang penting, sementara <i>soft news</i> berhubungan dengan peristiwa yang menarik.
<i>Spot News</i>	<i>Spot News</i> adalah subklasifikasi dari berita yang berkategori <i>hard news</i> . Dalam <i>spot news</i> , peristiwa yang akan diliput tidak bisa direncanakan.
<i>Developing News</i>	<i>Developing News</i> adalah subklasifikasi lain dari <i>hard news</i> . Baik <i>spot news</i> maupun <i>developing news</i> umumnya berhubungan dengan peristiwa yang tidak terduga. Tetapi dalam <i>developing news</i> dimasukkan elemen lain, peristiwa yang diberitakan adalah bagian dari rangkaian berita yang diteruskan keesokan atau dalam berita selanjutnya.
<i>Continuing News</i>	<i>Continuing News</i> adalah subklasifikasi lain dari <i>hard news</i> . Dalam <i>continuing news</i> peristiwa-peristiwa bisa diprediksi dan direncanakan.

Tabel II: Eriyanto, *Analisis Framing; Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, Yogyakarta. LKIS. 2002. hal 109-110.

Seperti apa yang dikatakan McDougall<sup>37</sup>:

*"At an given moment billions of simultaneous events occur throughout the world.... All of these occurrences are potentially news. They do not become so until some purveyor of news given an account of them. The news, in other words, is the account of the event, not something intrinsic in the event itself."*

“Setiap hari ada jutaan peristiwa didunia ini, dan semuanya secara potensial dapat menjadi berita. Peristiwa-peristiwa itu tidak serta merta-

<sup>37</sup> Eriyanto, *Ibid*, hal 102.

menjadi berita karena batasan yang disediakan dan dihitung, mana berita dan mana bukan berita. Berita, dengan kata lain adalah peristiwa yang ditentukan sebagai berita, bukan peristiwa itu sendiri.”

Sehingga tidak semua peristiwa yang ditangkap oleh wartawan akan diberitakan kepada khalayak. Sebuah berita yang layak ditampilkan kepada khalayak adalah peristiwa yang telah melalui proses penilaian terlebih dahulu dimeja redaksi. Jika kemudian bagian dari sebuah peristiwa telah dinyatakan memiliki nilai berita, maka bagian itulah yang kemudian ditekankan untuk terus menerus disampaikan kepada publik. Sehingga inilah yang menyebabkan mengapa berita ada yang ditampilkan dalam ukuran yang besar atau kecil, didepan atau dibelakang, panjang atau pendek, komentar siapa yang banyak ditampilkan, sampai bagian mana yang dianggap kurang penting sehingga bisa dihilangkan.

Sebuah peristiwa dapat dikatakan memiliki nilai berita jika peristiwa tersebut berhubungan dengan para elite atau orang yang terkenal, terdapat unsur humor, human interest, dapat memancing kesedihan, keharuan, dan lain-lain. Menurut Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese ada 6 unsur nilai dalam berita:

- a. Prominence/importance. The importance of the story is measured in its impact: how many lives its affects. Fatalities are more important than property damage. Actions of the powerful are newsworthy, because what the powerful do affects the general public*
- b. Human interest. In addition, thought, people interested in lots of thing that don't have any direct effect on their lives: celebrities, political gossip, and human dramas. Stories with a human element elicit this kind of interest that's why television news, in particular, illustrates issues through the people affected.*
- c. Conflict/controversy. Why are we so interested in controversy? Its signals conflict and alerts us to important issues. Conflict is inherently more interesting than harmony. Maybe we assume that the most of the time things are harmonious, but when they aren't we want to know about it.*

- d. *The unusual. The un usual also interests us. We assume that the events of one day will be pretty much like than the next, and the unusual is the exception to that rule.*
- e. *Timeliness. News in timely. We have limited attention and want to know what's happening now. Timely events are also more likey to require action.*
- f. *Proximity. Event that happen nearby are considereed more newsworthy. Local events usually have more effect than distant ones. Local media seeks local angels in national stories so as to better interest the audience.*<sup>38</sup>

**Prominance.** Nilai berita diukur dari tingkat kebesaran peristiwa, seperti sebuah kejadian bencana gempa bumi yang telah merenggut ribuan korban jiwa, daripada sebuah berita kecelakaan sepeda motor yang hanya menyebabkan korban luka.

**Human Interest.** Berita yang lebih banyak mengandung unsur haru, sedih, dan menguras emosi khalayak. Seperti peristiwa seorang anak korban gempa bumi yang harus berjuang hidup sebatang kara karena ditinggal mati keluarganya dan tidak memiliki tempat tinggal. Dari pada peristiwa dua keluarga yang terpisah karena gempa bumi.

**Conflict/controversy.** Peristiwa yang mengandung konflik cenderung lebih menarik jika dibandingkan dengan peristiwa yang biasa-biasa saja. Seperti konflik antara masyarakat Papua dengan PT Freeport yang menjadi kajian penulis.

**The unusual.** Peristiwa yang dianggap unik dan jarang atau belum pernah terjadi, dan tergolong peristiwa langka. Peristiwa operasi *face off* yang pertama kali di Indonesia telah dilakukan di Surabaya.

---

<sup>38</sup> Shoemaker and Reese. "Mediating The Message", 2nd Edition, (1996). New York, Longman Publishers USA, hal 111.

*Timeliness.* Peristiwa yang terjadi pada waktu-waktu tertentu atau peristiwa yang terjadi setiap dua puluh tahunan. Peristiwa meletusnya gunung Merapi lebih bisa dianggap memiliki nilai berita dibandingkan dengan peristiwa banjir tahunan.

*Proximity.* Peristiwa yang dekat dengan khalayak pembaca akan lebih bernilai dari pada peristiwa yang lokasi kejadian berada jauh dari khalayak pembaca, baik dari segi fisik maupun emosional.

## 5. Analisis Framing

Media massa digambarkan oleh Dedy N. Hidayat sebagai sebuah arena sosial atau sebuah panggung publik.<sup>39</sup> Disanalah berbagai kelompok berusaha menampilkan definisi situasi serta definisi realitas sosial menurut versi mereka sendiri. Menurutnya berbagai dimensi esensial, isu permasalahan sehari-hari beserta figur yang terkait didefinisikan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan definisi versi mereka sendiri, dan masing-masing bertarung untuk menjadikan versinya sebagai yang paling sah didalam media massa. Dengan kata lain media massa berposisi sebagai wadah dimana isu-isu permasalahan umum bisa diperdebatkan dengan cara memasok dan menyebarluaskan informasi yang diperlukan untuk penentuan sikap, memfasilitasi pembentukan opini publik.

Namun dalam model "arena sosial" tersebut pers dilihat sebagai saluran yang tidak netral, aktif, dan tidak sekedar kumpulan medium yang melaporkan realitas sosial. Media massa adalah pelaku yang menampilkan diri (baik secara

---

<sup>39</sup> Nugroho, Eriyanto, dan Surdiasis "*Politik Media Mengemas Berita*", Institut Studi Arus Informasi, LKiS Yogyakarta, 1999, hal. vii

menggebu-gebu ataupun secara terpaksa) sebagai *defining agency* untuk mendefinisikan isu permasalahan yang relevan.<sup>40</sup>

Upaya media untuk mendefinisikan realitas sosial seperti itulah yang akan mampu diungkap melalui analisis framing. Analisis Framing mempunyai asumsi bahwa wacana yang dihasilkan media massa mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menentukan apa yang penting atau signifikan bagi publik bagi bermacam-macam isu dan persoalan yang hadir dalam wacana publik.

Pemikiran tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Charlotte Ryan:

*"Struggles over framing decide which of the day's many happenings will be awarded significance. Today, the media have become critical arenas for this struggles, and social movements have increasingly focused on the media since it plays such an influential role in assigning importance to issues facing the public. But gaining attention alone is not what a social movement wants; the real battle is over whose interpretation, whose framing of reality, gets the floor".*<sup>41</sup>

"Saat ini pertarungan lewat framing menentukan peristiwa mana yang ditekankan. Media menjadi arena kritis dari pertarungan dan gerakan sosial, hal ini menempatkan media pada peran penentu agar suatu isu menjadi penting atau tidak dihadapan khalayak. Sebenarnya peningkatan perhatian itu sendiri bukanlah pada gerakan sosialnya melainkan lebih kepada penafsiran yang menampilkan pandangan atas realitas agar didukung oleh orang banyak".

Analisis framing juga dapat digunakan untuk melihat konteks sosial-budaya suatu wacana, khususnya hubungan antara berita dan ideologi, yakni proses atau mekanisme mengenai bagaimana berita membangun, mempertahankan, memproduksi, mengubah, dan meruntuhkan ideologi. Tak hanya itu, analisis framing dapat digunakan untuk melihat siapa mengendalikan siapa dalam suatu struktur kekuasaan, pihak mana yang diuntungkan dan

<sup>40</sup> Nugroho, Eriyanto, dan Surdiasis, *Ibid*, hal viii

<sup>41</sup> Agus Sudibyo, "*Politik Media dan Pertarungan Wacana*". LKIS. Yogyakarta. 2001. hal 220

dirugikan, siapa si penindas dan siapa yang tertindas, kebijakan publik mana yang harus didukung dan tidak boleh didukung, dan lain sebagainya.

Berbagai definisi tentang framing telah banyak dilontarkan para ahli, menurut Robert N. Entman framing adalah "seleksi dari berbagai aspek realitas yang diterima dan membuat peristiwa itu menonjol dalam suatu teks komunikasi, dalam banyak hal itu berarti menyajikan secara khusus definisi terhadap masalah, interpretasi sebab akibat, evaluasi moral, dan tawaran penyelesaian sebagaimana masalah itu digambarkan." Dalam konsep Entman framing pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berfikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan.

Sedangkan menurut Gamson Framing merupakan cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan obyek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam sebuah kemasan yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan yang disampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan-pesan yang ia terima.

Meski beberapa ahli berbeda dalam mengartikan framing, tetapi kita dapat menarik benang merah diantaranya untuk dijadikan sebagai pisau analisis. Hampir semua para ahli sepakat bahwa framing adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi.<sup>42</sup> Muara akhirnya adalah ada

---

<sup>42</sup> **Robert N Etman** mendefinisikan framing adalah proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain, sedangkan framing menurut **William. A**

beberapa bagian yang ditonjolkan dan beberapa bagian lain yang disembunyikan. Akibatnya khalayak akan mengingat hal-hal tertentu yang ditampilkan dan mengesampingkan hal yang tidak muncul dalam pemberitaan.

Analisis framing berpretensi untuk menjelaskan persoalan yang sama menjadi sangat berbeda ketika dikonstruksi media yang berbeda. Analisis framing ingin menunjukkan terjadinya proses seleksi dan penajaman aspek realitas dalam produksi berita sehingga aspek tertentu dari realitas menjadi lebih dominan daripada aspek yang lain. Asumsinya adalah elemen isu yang ditonjolkan mempunyai peluang lebih besar untuk dipertimbangkan khalayak pembaca atau dengan kata lain penonjolan yang berbeda terhadap fakta berita pada gilirannya akan menggiring perhatian publik pada titik tertentu dan melahirkan persepsi yang berbeda. Penonjolan disini didefinisikan dengan membuat informasi lebih diperhatikan, bermakna, dan berkesan. Hal tersebut bisa dilakukan misalnya dengan pengulangan, asosiasi, dengan simbol budaya, penempatan yang mencolok, generalisasi, implifikasi, dan lain-lain.

---

**Gamson** adalah cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam sebuah kemasan (*package*). Kemasan itu semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan yang ia sampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan-pesan yang ia terima, untuk **Todd Gitlin** framing adalah strategi bagaimana realitas / dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca. Itu dilakukan dengan seleksi, pengulangan, penekanan, dan presentasi aspek tertentu dari realitas. Sumber: Eriyanto, Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi dan Politik Media, LKIS, Yogyakarta, 2002, hal 66-67

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dapat digolongkan kedalam metode penelitian deskriptif kualitatif, karena penelitian ini melalui analisis framing akan menggambarkan konstruksi realitas yang dibangun oleh media, bagaimana sebuah realitas dibingkai dan disajikan oleh media. Dan posisi peneliti dalam penelitian deskriptif ini adalah sebagai pengamat. Selain itu tujuan dari penelitian deskriptif menurut Issac dan Michael adalah melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau suatu bidang secara faktual dan cermat.<sup>43</sup>

### **2. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian ini adalah surat kabar harian Kompas dan harian Republika yang terbit pada tanggal 22 Februari s/d 16 Maret 2006. Alasan penulis dalam memilih obyek penelitian tersebut karena menurut hasil pre survei yang telah dilakukan oleh penulis, penulis menemukan perbedaan yang signifikan dari pemberitaan kedua media tersebut tentang kasus PT Freeport.

Harian Kompas dalam mengkonstruksi kasus ini lebih menghendaki PT Freeport berhenti beroperasi, karena keberadaan PT Freeport selama ini belum bisa mensejahterakan masyarakat Papua yang sebenarnya memiliki hak atas kekayaan alam yang mereka miliki. Sedangkan harian Republika lebih menghendaki penyelesaian konflik melalui jalur damai tanpa menggunakan

---

<sup>43</sup> Issac dan Michael, dalam Jalaludin Rahmat, " *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung (1984), Remadja Karya, hal. 30

kekerasan sehingga PT Freeport tetap dapat beroperasi sesuai dengan kontrak karya yang telah dibuat bersama pemerintah Indonesia.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

#### **a. Data Primer**

Pengumpulan data primer dilakukan dengan mengumpulkan klipring surat kabar dari kedua media yang memberitakan persetujuan masyarakat Papua dengan PT Freeport Indonesia.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data-data yang dapat mendukung analisis dari penelitian yang menggunakan analisis framing ini. Data sekunder berupa studi pustaka, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber antara lain: buku, surat kabar, jurnal, literatur, serta dokumentasi lain yang relevan dengan penelitian ini.

### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis framing. Dan model analisis framing yang digunakan adalah model yang dikembangkan oleh William A. Gamson dan Andre Modigliani.

Gamson adalah seorang sosiolog yang memiliki minat yang sangat besar pada studi media, Gamson menitikberatkan perhatiannya pada studi mengenai gerakan sosial (*social movement*). Ia membagi framing kedalam dua level.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Eriyanto, *Ibid*, hal 217

Pertama, level personal yaitu bagaimana setiap orang mempunyai konstruksi yang berbeda-beda terhadap realitas atau peristiwa. Kedua, level kultural yaitu bagaimana budaya masyarakat dan alam pikiran khalayak menentukan bagaimana peristiwa atau isu dikonstruksi dan dibentuk. Setiap individu mempunyai pengalaman sejarah, latar biologis, interaksi, dan predisposisi psikologis tersendiri yang digunakan olehnya dalam mengkonstruksi makna.

Model framing Gamson dan Modigliani memandang framing sebagai seperangkat gagasan atau ide sentral ketika seseorang atau media memaknai suatu isu. Ide sentral dalam konsep Gamson dan Modigliani dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

**Pertama**, *framing device* (perangkat framing), perangkat ini berkaitan langsung dengan ide sentral atau bingkai yang ditekankan dalam teks berita. Perangkat framing ini ditandai dengan pemakaian kata, kalimat, grafik atau gambar dan metafora tertentu.

**Kedua**, *Reasoning devices* (perangkat penalaran), perangkat ini berkaitan dengan kohesi dan koherensi teks berita yang merujuk pada gagasan tertentu. Sebuah gagasan tentu tidak hanya berisi kata atau kalimat namun selalu ditandai oleh dasar pembenaran atau penalaran tertentu. Dasar penalaran ini bertujuan untuk mengukuhkan suatu gagasan dan juga membuat gagasan tersebut tampak benar, absah, dan apa adanya. Lewat aspek penalaran ini maka khalayak akan menerima pesan tersebut sebagai suatu kebenaran yang alamiah dan wajar.

**Tabel III**  
**Perangkat Framing Model Gamson dan Modigliani**

<p><b>Frame:</b></p> <p><i>Central organizing idea for making sense of relevant eventss, suggesting what is at issues.</i></p>	
<p><b>Framing Device</b> (Perangkat Framing)</p>	<p><b>Reasoning Devices</b> (Perangkat Penalaran)</p>
<p><b>Methapors</b> Perumpamaan atau pengandaian</p>	<p><b>Roots</b> Analisis kausal atau sebab akibat.</p>
<p><b>Catchphrases</b> Frase yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana. Ini umumnya berupa jargon atau slogan.</p>	<p><b>Appeals to principle</b> Permis dasar, klaim-klaim moral.</p>
<p><b>Exemplaar</b> Mengaitkan bingkai dengan contoh, uraian (bisa teori, perbandingan) yang memperjelas bingkai.</p>	<p><b>Consequences</b> Efek atau konsekuensi yang didapat dari bingkai.</p>
<p><b>Depiction</b> Penggambaran atau penulisan suatu isu yang bersifat konotatif. <i>Depition</i> ini umumnya berupa kosakata, leksikon untuk melabeli sesuatu.</p>	

<p><b>Visual Images</b></p> <p>Gambar, grafik, citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan. Bisa berupa foto, kartun, ataupun grafik untuk menekankan dan mendukung pesan yang ingin disampaikan.</p>	
---	--

Tabel III: Eriyanto, *Analisis Framing; Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, Yogyakarta. LKIS. 2002. hal 225

## Operasionalisasi Perangkat Framing

### 1. *Framing Devices* (Perangkat Framing)<sup>45</sup>

**Metaphors.** Secara sederhana *metaphors* dapat diartikan sebagai perumpamaan atau kiasan dengan menggunakan kata-kata seperti, ibarat, sebagai umpama, laksana. *Metaphors* memiliki peran ganda sebagai perangkat diskursif dan sebagai ekspresi piranti mental. Peran yang kedua yakni berasosiasi dengan asumsi atau penilaian serta memaksakan teks membuat *sense* tertentu.

**Catchphrases,** merupakan bentukan kata atau frase dari cerminan fakta yang merujuk pemikiran atau semangat tertentu, atau yang dikenal dalam teks berita mewujudkan dalam bentuk jargon, slogan atau semboyan. *Catchphrases* juga dapat diartikan sebagai suatu kalimat yang akan membangkitkan semangat.

**Exemplar,** merupakan pengemasan fakta tertentu yang secara mendalam agar satu sisi berita memiliki bobot makna. *Exemplar* juga dapat dikatakan sebagai ilustrasi yang mendukung bingkai pada sebuah berita, bentuknya bisa berupa teori atau perbandingan. Posisi *exemplar* menjadi pelengkap bingkai inti dalam kesatuan berita untuk membenarkan perspektif wartawan dalam menulis berita.

**Depiction.** Merupakan gambaran fakta, istilah, kalimat konotatif agar khalayak terarah ke citra tertentu, kemudian *depiction* dapat berbentuk stigma, eufimisme, serta akronimisasi dari suatu berita. Dalam sebuah berita, media menggunakan *depiction* untuk membentuk sebuah citra mengenai objek yang diberitakan.

**Visual Images.** *Visual images* seperti pemakaian foto, grafis, tabel, kartun, dan sejenisnya adalah upaya untuk mengekspresikan kesan. *Visual images* sangat mewakili realitas yang membuat erat ideologi pesan dengan khalayak, yang tujuan akhir dalam analisis kausal adalah membenarkan penyimpulan fakta berdasarkan hubungan sebab akibat yang digambarkan atau dibeberkan dalam bentuk tulisan.

<sup>45</sup> Alex Sobur, (2001). *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya. hal 179.

fungsi lain dari *visual images* adalah memanipulasi fakta agar bermakna dan dipercaya, sebab *visual images* lebih berdaya memindahkan realitas dalam wacana dibandingkan teks. Keberadaan *visual images* akan memperkuat bingkai dari berita.

## 2. Reasoning Devices (Perangkat Penalaran)

*Roots* adalah analisis kausal atau sebab akibat. *Roots* dapat dikatakan sebagai pembenaran isu dengan menghubungkan suatu obyek atau lebih yang dianggap menjadi sebab timbulnya hal yang lain. Tujuannya adalah untuk membenarkan penyimpulan fakta berdasarkan hubungan sebab akibat yang digambarkan.

*Appeal to Principle*, *Appeal to principle* dalam sebuah berita digunakan untuk menyerang argumentasi dari pihak lawan dengan cara memberikan klaim tertentu. *Appeal to principle* sebagai argumentasi pembenar membangun berita, berupa pepatah, cerita rakyat, mitos, doktrin, dan lain sebagainya. *Appeal to principle* yang apriori dogmatis, simplistic dan monokausal (non logis) adalah bertujuan membuat para khalayak atau pembaca tidak berdaya menyanggah argumentasi yang ada, karena fokus dari *appeal to principle* adalah untuk memanipulasi emosi dari pembaca agar mengarah ke sifat, waktu, tempat, cara tertentu, serta untuk membuat si pembaca tertutup dari penalaran yang lainnya.

*Consequences*<sup>46</sup>. Adalah efek atau konsekuensi yang didapat dari bingkai atau merupakan efek yang didapat dari *frame* sebuah berita. *Consequences* merupakan bagian akhir dari bingkai atau dapat juga dikatakan sebagai kesimpulan akhir yang didapat dari bingkai yang dibentuk pada sebuah berita. Contohnya, kalau kenaikan seperti BBM, Elpiji adalah upaya pemerintah agar masyarakat Indonesia bisa mandiri, maka yang ada dibenak pembaca adalah harus menerima konsekuensi kebijakan tersebut yang dimulai sejak awal Januari 2003.

---

<sup>46</sup> Eriyanto, *Ibid.* hal 225.